

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap-tiap bangsa di dunia senantiasa berhadapan dengan masalah kemiskinan, dan diantara banyak aspek yang menyebabkan runtuhnya peradaban satu generasi ialah kemiskinan. Sebab selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa kemiskinan akan mendekatkan seseorang pada kekufuran. Islam, sebagai rahmat pada seluruh alam, sudah memberikan sejumlah konsep yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kemakmuran hidup di dunia ini dan kenikmatan hidup sesudah kematian.

Dari segi syariat Islam, pengentasan kemiskinan dilakukan lewat dua langkah: menginspirasi seseorang untuk bekerja keras pertama-tama, dan kedua, mendorong orang kaya untuk memberi pada orang miskin. Al-Qur'an diturunkan, menurut Qardhawi, untuk mendorong orang-orang kaya agar mempartisi sebagian hartanya pada orang lain. Orang kaya diwajibkan oleh sejumlah hukum Syariah untuk menyumbangkan kekayaannya pada mereka yang memerlukan.

Untuk mencapai kesuksesan dalam pengelolaan zakat melalui suatu lembaga, penting untuk memprioritaskan keandalan, manfaat, keadilan,

kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹

Berlandaskan UU Republik Indonesia No 23 perihal pengelolaan zakat point d menuturkan bahwa zakat harus dikelola secara kelembagaan selaras dengan hukum Islam untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas.²

Dua tujuan pengelolaan zakat ialah untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan memperluas peran zakat sebagai alat untuk mempertinggi kekayaan dan sarana pengentasan kemiskinan. Seperti yang diharapkan mengingat fungsi organisasi pengelola zakat, niscaya akan terjadi aliran kekayaan dari yang kaya pada yang berhak menerimanya. Selaras dengan tujuan pengelolaan zakat, lembaga pengawas diperlukan untuk menjalankan banyak kewajiban, sehubungan dengan hal itu harus ditangani dengan sebaik mungkin. Dengan sengaja mengeluarkan zakat akan membangkitkan rasa kepedulian pada sesama dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hukum Islam (syariah) harus diikuti dalam semua kebijakan, prosedur, dan praktik organisasi pengelola zakat.

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola zakat Indonesia diskursus pengelolaan zakat nasional dari rezim Undang-undang No. 38 tahun 1999 ke rezim Undang-undang No. 23 tahun 2011*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 22.

²“Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Perihal Pengelolaan Zakat” <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/14TAHUN2014PP.HTM>, diakses pada 14 Januari 2023, Pkl. 19.00WIB.

Nampaknya untuk menggerakkan masyarakat mengeluarkan zakat, lembaga pengelola zakat harus memperlihatkan dedikasi dan integritas dalam pengelolaan zakatnya. Sebuah sistem yang mendorong umat Islam untuk membayar zakat diperlukan di era globalisasi, seperti halnya khalifah Umar bin Khattab yang akan berperang melawan mereka yang menolak membayar zakat pada masa pemerintahannya.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. at-Taubah: 103).⁴

Sehubungan dengan hal itu, penguatan kelembagaan diperlukan untuk menjawab problematika luas yang dihadapi lembaga pengelola zakat, terlebih problematika profesionalisme. Lembaga pengelola zakat harus tunduk pada kaidah tata kelola perusahaan yang baik agar bisa menjalankan tugasnya selaras dengan tujuan didirikannya lembaga itu, termasuk memaksimalkan potensi zakat untuk mengurangi kemiskinan masyarakat.

³ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 66.

⁴ “QS At Taubah Ayat 103”, <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-103>, diakses pada tanggal 15 Januari, pkl. 20.45 WIB.

Secara teoritis, implementasi tata kelola perusahaan yang sehat oleh lembaga pengelola zakat akan mendorong pemberi zakat untuk menjalankan pembayaran zakat lewat lembaga itu. Sehingga organisasi pengelola zakat bisa secara efektif memakai zakat dan bersama-sama merealisasikan tujuan yang ditentukan dalam pengalokasiannya.

Tetapi pada kenyataannya problematika kemiskinan merupakan problematika besar yang ada sejak lama. Saat memutuskan kebijakan, pemerintah secara serius mempertimbangkan angka kemiskinan Indonesia. Angka kemiskinan di negeri ini belum banyak diturunkan secara signifikan oleh berbagai kebijakan sektoral, moneter, fiskal, dan lainnya. Kenyataannya, kondisi miskin tidak statis. Kondisi miskin selalu bergerak kearah yang lebih baik maupun kearah yang memprihatinkan. Kondisi ini dinamakan kondisi kemiskinan yang dinamis.⁵

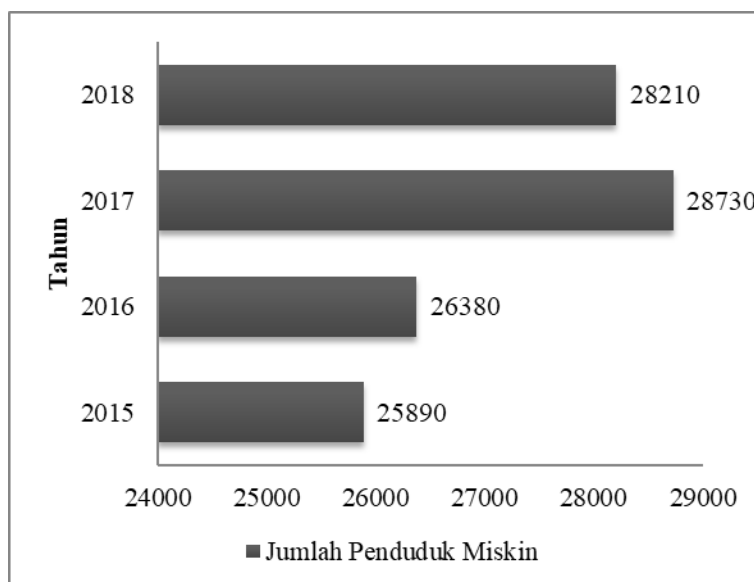
Jumlah dana Zakat yang diterima pada tahun 2016 senilai Rp97.637.657.910 dan nilai yang disalurkan senilai Rp67.727.019.807. Pada tahun 2017 dana Zakat yang diterima senilai Rp138.096.290.551 dan nilai yang disalurkan senilai Rp188.071.046.770. Selanjutnya, untuk tahun 2018 penerimaan dana zakat senilai Rp 195.092.051.942 dengan nilai penyaluran senilai 175.811.470.985. Sehubungan dengan hal itu, bisa

⁵ Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*, (Jakarta: Pustaka Obor), h. 4.

dikatakan bahwa jumlah zakat yang diterima dan disalurkan meningkat secara signifikan. Tetapi, alasan mengapa kemiskinan justru meningkat di sejumlah daerah masih menjadi misteri, termasuk di kota Tangerang Selatan.⁶

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2018, ada 25,67 juta penduduk miskin di Indonesia atau 9,66 persen dari jumlah penduduk. Ini merupakan penurunan 0,91 juta jiwa dari 26,58 juta penduduk miskin (atau 10,12 persen) pada kondisi September 2017. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi penyumbang angka kemiskinan; pada September 2015, ada 690.670 penduduk di sana; pada September 2016, ada 657.750 penduduk; pada September 2017, ada 699.830 penduduk; dan pada bulan September 2018, ada 668.740 penduduk; Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang menyumbang angka kemiskinan. Sebanyak 28.210 orang, atau sekitar 1,68 persen penduduk, hidup dalam kemiskinan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018. Berlandaskan grafik 1.1, angka itu meningkat dari tahun sebelumnya. Dikomparasikan dengan kota-kota lain dan tingkat kemiskinan Indonesia saat ini, angka ini jauh lebih rendah. tambahan diperlukan alat untuk membantu dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

⁶ Romantin, Maya, Efri Syamsul Bahri & Ahmad Tirmidzi Lubis. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat* (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). (Jakarta:Perisai, 2017), h.14.



Grafik 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Tangerang Selatan Tahun 2015-2018

Aslie Elhusyairy, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang, menyampaikan rasa sesal atas situasi yang melibatkan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam laporan dari berita Tangerang. Alasannya, kasus itu berimbas pada institusi yang sebanding. Aslie menggaris bawahi perbedaan antara BAZNAS dan ACT, meskipun kedua organisasi itu bekerja dalam penghimpunan dan distribusi barang: BAZNAS ialah lembaga zakat di bawah Kementerian Agama, di lain sisi ACT ialah organisasi kemanusiaan di bawah Kementerian Sosial. Menurut aturan yang berlaku, kata Aslie, baik pemerintah pusat ataupun daerah berhak mengintervensi kasus ACT. Ini akan mencegah kejadian berulang

dari insiden yang sama.⁷ Berlandaskan kutipan berita itu akan berimbas pada lembaga yang seruapa tidak terkecuali BAZNAS Kota Tangerang sehingga diperlukannya perbaikan di pihak manajemen pengelolaan zakat dengan mengimplementasikan tata kelola yang baik pada lembaga.

Menurut penelitian Rahma Suryaningtyas, Hasil pengukuran indeks dimensi makro senilai 0,70 yang memperlihatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang secara keseluruhan baik. Nilai indeks dimensi mikro ialah 0,53 yang memperlihatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang sangat baik dalam hal ini. Berlandaskan penilaian kinerja BAZNAS, nilai Indeks Zakat Nasional Kabupaten Tangerang senilai 0,60 memperlihatkan keadaan yang cukup baik.⁸

Lembaga pengelola zakat menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan operasionalnya. Mereka memberikan informasi yang relevan, tepat waktu, jelas, dan mudah diakses kepada muzaki. Selain itu, lembaga tersebut juga menerapkan gagasan tanggung jawab dengan menguraikan peran dan kewajiban para karyawan. Mereka juga memantau keahlian, peran, dan tanggung jawab para karyawan, serta memberikan pelatihan manajemen yang ahli. Lembaga pengelola zakat juga menerapkan gagasan

⁷“Ketua BAZNAS Tangerang Menyayangkan Kasus yang Menimpa ACT” <https://beritatangerang.id/ketua-baznas-kota-tangerang-menyayangkan-kasus-yang-menimpa-act/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 12.32 WIB.

⁸ Rahma Suryaningtyas, “Analysis of BAZNAZ Tangerang District Performance”, in *International Journal of Zakat*, Vol. 3(2) 2018, h.57-53.

tanggung jawab dengan mematuhi persyaratan hukum dan etika, serta menyadari kewajiban mereka terhadap masyarakat dan menjaga profesionalitas.⁹

Berlandaskan uraian di atas, memberikan dorongan peneliti untuk melakukan studi ini sebab belum ditemukan studi yang membahas perihal analisis implementasi *Good Corporate Governance* (studi kasus BAZNAS Kota Tangerang) dengan pendekatan indeks zakat nasional periode 2021.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam studi ini adalah.

1. Studi ini difokuskan pada implementasi *Good Corporate Governance* di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tangerang, sehingga sehingga tidak melibatkan BAZNAS di daerah lain.
2. Studi ini akan memakai pendekatan Indeks Zakat Nasional untuk mengukur implementasi *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kota Tangerang, sehingga tidak akan memakai metode pengukuran implementasi *Good Corporate Governance* lainnya.
3. Studi ini akan berfokus pada periode 2021, sehingga tidak akan membahas implementasi *Good Corporate Governance* di masa lalu atau masa depan.

⁹ Didin Hafidhuddin, Irwan Kelana, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), h.34.

4. Studi ini akan berfokus pada studi kasus di BAZNAS Kota Tangerang, sehingga tidak akan menggambarkan implementasi *Good Corporate Governance* di BAZNAS di daerah lain yang berlainan.

C. Perumusan masalah

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini, bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* pada BAZNAS Kota Tangerang dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini, maka tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* pada BAZNAS Kota Tangerang dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional periode 2021.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah, studi ini bisa bermanfaat atas sejumlah hal, yakni:

1. Kontribusi teoritis
 - a. Mahasiswa bisnis dan ekonomi Islam bisa memakai ini sebagai sumber untuk mempelajari lebih lanjut perihal bagaimana lembaga amil zakat beroperasi.

b. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi yang akan menjalankan penelitian lebih lanjut perihal topik ini.

c. Peneliti, guna menambah pengetahuan dan wawasan perihal analisis tata kelola perusahaan yang baik.

2. Kontribusi Praktis

Tinjauan itu diharapkan bisa dipakai sebagai maklumat untuk membantu lembaga amil zakat Indonesia menjalankan pekerjaan yang lebih baik dalam memerangi kemiskinan negara saat ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Yulinartati, dkk., dengan judul penelitian “Prinsip *Good Corporate Governance* dan Tingkat Kepuasan Muzaki dalam Pemberian Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember”. Teknik penelitian kuantitatif dipakai dalam studi ini. Di Kabupaten Jember, muzaki yang terdaftar di berbagai amil zakat menjadi populasi penelitian. Dalam penyelidikan ini, random sampling dipilih sebagai metode sampel. Ada 97 responden dalam sampel penelitian. Temuan penelitian ialah diantaranya analisis regresi berganda relasi antara transparansi dan kepuasan mengungkapkan relasi positif yang signifikan secara statistik. Hasil pengujian regresi berganda perihal imbas akuntabilitas pada kepuasan muzaki dalam menyalurkan uang zakat

mengindikasikan bahwa transparansi yang tinggi akan mempertinggi kepuasan muzaki.¹⁰ Studi yang akan ditelaah dan studi ini memiliki kesamaan fokus pada tata kelola perusahaan yang baik. Perbedaannya ialah bahwa peneliti akan memakai teknik kualitatif yang bertentangan dengan Yulinarti et al. memakai teknik kuantitatif.

2. Reza Fahmi Baehaqi dengan judul penelitiannya “Analisis Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Daarul Qur’an Berlandaskan PSAK 109 dalam Penguatan Prinsip *Good Corporate Governance*”. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipakai sebagai teknik analisis. Metode wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam studi ini. Studi ini memperlihatkan implementasi parsial PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan oleh LAZNAS PPPA Daarul Qur’an. Sebagai pengakuan atas kebijakan yang tidak tepat, PPPA Daarul Qur’an menerima bagian 12 koma lima persen dari dana zakat saat muzakki memutuskan mustahiq sendiri saat menerima dana zakat. Sifat relasi antara amil dan penerima dana infaq/sedekah juga tidak diungkapkan oleh CALK, dan efektivitas amil dalam menerima dan menyalurkan dana zakat dan infaq/sedekah juga tidak dipublikasikan.

¹⁰ Yulinarti, Adella Lagareta & Iswanto Suwarno, “Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Tingkat Kepuasan *Muzaki* dalam Menyalurkan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember”, dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Januari-Juni 2020, Vol 9(1): h 25-32.

Sementara PPPA Daarul Qur'an sudah mengimplementasikan lima prinsip GCG, ada kekurangan di bidang transparansi, terlebih tidak adanya pemutakhiran laporan keuangan tahunan periode 2019–2020, yang memiliki *website*.¹¹ Persamaan dengan studi yang akan dilakukan peneliti ialah sama-sama meneliti *good corporate governance* di lain sisi perbedaannya penelitian Reza Fahmi Baehaqi memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di lain sisi studi yang akan dilakukan peneliti memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

3. Mahyuddina Almas dengan penelitiannya “Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember”. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) Yatim Mandiri Jember merupakan tempat penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sampling *purposive* dipakai untuk memilih informan penelitian. mewawancarai, mengamati, dan mendokumentasikan ialah semua metode pengumpulan data. Sementara reduksi data, penyajian, dan pengambilan kesimpulan dipakai dalam analisis data, teknik triangulasi sumber dipakai untuk memastikan data akurat. Studi ini

¹¹ Reza Fahmi Baehaqi, “Analisis Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Daarul Qur'an Berlandaskan PSAK 109 dalam Penguatan Prinsip *Good Corporate Governance*”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 57.

membuahkan kesimpulan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) Yatim Mandiri Jember sudah mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* baik dalam penghimpunan dan pengalokasian dana zakat yaitu dengan rutin memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara terbuka pada para *muzakki*, pembagian struktur organisasi dan pemberian tugas selaras dengan keahlian dan bidangnya masing-masing, pengeloaan zakat sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga bertanggungjawab pada para *muzakki* dan kebutuhan para mustahik, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) Yatim Mandiri Jember merupakan lembaga yang dikelola secara independen sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan memberikan perlakuan pada *muzakki* dan mustahik secara adil dan jujur.¹² Persamaan dengan studi yang akan dilakukan peneliti ialah sama-sama meneliti *good corporate governance* di lain sisi perbedaannya penelitian Reza Fahmi Baehaqi memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di lain sisi studi yang akan dilakukan peneliti memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

¹² Mahyuddina Almas, "Implementasi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember", (Skripsi IAIN Jember, 2021), h. viii.

4. Sri Mulyati, dkk., dengan judul penelitian “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Yogyakarta”¹³. Teknik penelitian kuantitatif dipakai dalam studi ini. Populasi penelitian ialah seluruh LAZ di Kota Yogyakarta, dengan sampel penelitian sebanyak 25 LAZ yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LAZ. Persamaan, kedua penelitian membahas mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga-lembaga Amil Zakat di daerah tertentu di Indonesia. Perbedaan, penelitian utama lebih difokuskan pada analisis implementasi *Good Corporate Governance* pada BAZNAS Kota Tangerang dengan menggunakan pendekatan Indeks Zakat Nasional, sementara penelitian terdahulu 1 lebih difokuskan pada pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja LAZ di Kota Yogyakarta.
5. Endang Retno Wulandari, dkk., dengan judul penelitian “Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten Bantul”¹⁴. Teknik penelitian kualitatif

¹³ Mulyati, S., Purnomo, Y. W., & Rusyadi, A. (2019). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 64-76.

¹⁴ Wulandari, E. R., Sulistyanto, A., & Dwijayanti, E. (2020). Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 173-186.

dipakai dalam studi ini. Populasi penelitian ialah seluruh LAZ di Kabupaten Bantul, dengan sampel penelitian sebanyak 5 LAZ yang dipilih secara *purposive sampling*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan zakat di LAZ Kabupaten Bantul masih perlu ditingkatkan. Persamaan, kedua penelitian membahas mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga-lembaga Amil Zakat di daerah tertentu di Indonesia. Perbedaan, penelitian utama lebih difokuskan pada analisis implementasi *Good Corporate Governance* pada BAZNAS Kota Tangerang dengan menggunakan pendekatan Indeks Zakat Nasional, sementara penelitian terdahulu 2 lebih difokuskan pada penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan zakat di LAZ Kabupaten Bantul. Selain itu, teknik penelitian yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian utama menggunakan teknik analisis indeks zakat nasional dan penelitian terdahulu 2 menggunakan teknik penelitian kualitatif.

G. Kerangka Pemikiran

1. Deskripsi *Good Corporate Governance*

Seperangkat aturan yang mengatur interaksi antara manajemen, pemberi pinjaman, pemerintah, pekerja, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, menurut Forum Tata Kelola Perusahaan

di Indonesia. Menurut Tadikapury yang mengutip Pasal 1 KEPMEN BUMN No. 117/M-MBU/2002, tanggal 31 Juli 2002, perihal implementasi GCG pada BUMN, tata kelola perusahaan mengacu pada praktik dan kerangka kerja yang dipakai organ BUMN untuk mempertinggi bisnis. kemampuan dan tanggung jawab bisnis untuk mempertinggi nilai pemegang saham secara berkelanjutan sambil mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan dan kerangka kerja ini didasarkan pada prinsip moral dan etika.

Menurut Laporan Turnbull di Inggris, tata kelola perusahaan dideskripsikan, yakni: Tata kelola perusahaan ialah sistem pengendalian internal organisasi, dan memiliki tiga tujuan utama: untuk melindungi aset perusahaan, mengelola risiko penting untuk pencapaian tujuan bisnisnya, dan mempertahankan nilai investasi jangka panjang perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006, tata kelola perusahaan yang baik dideskripsikan sebagai sistem perbankan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan.

2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Sutedi menyatakan, ada sejumlah prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yakni:

a. *Transparancy* (Keterbukaan)

Perusahaan harus memberikan maklumat yang memadai, akurat, dan tepat waktu pada pemangku kepentingannya agar dianggap transparan. Untuk menilai risiko dan manfaat dari investasi mereka, investor memerlukan maklumat yang cukup. Sulit bagi orang luar untuk menentukan apakah perusahaan menghimpun uang pada tingkat yang mengkhawatirkan sebab tidak tersedia catatan keuangan yang cukup rinci. Investor akan kesulitan memperkirakan nilai, risiko, dan pengembalian yang terkait dengan transformasi modal (volatilitas modal).

b. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas mengacu pada keterbukaan peran, sistem, struktur, dan tugas organ perusahaan untuk menjaga efisiensi pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan harus didasarkan pada pemisahan kekuasaan antara eksekutif perusahaan, yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari, dan pemegang saham, yang diwakili oleh dewan direksi. Direksi perlu mengatur pengawasan.

c. *Fairness* (Kesetaraan)

Untuk membela hak tiap-tiap orang, kesetaraan bermakna memperlakukan mereka semua secara adil dan setara. Kesetaraan

harus diutamakan dalam pengelolaan korporasi, terlebih bagi pemegang saham minoritas. Investor perlu memahami hak properti mereka dengan sangat baik, dan undang-undang dan peraturan harus ada untuk melindungi hak-hak itu.

d. *Sustainability* (Kelangsungan)

Bisnis bisa terus beroperasi dan membuahkan uang dengan tetap konsisten. Untuk bertahan hidup dan membuahkan uang dalam jangka panjang, bisnis (korporasi) negara harus menjumpai cara untuk menyenangkan karyawan dan masyarakatnya. Mereka harus mempertimbangkan lingkungan, mematuhi hukum, memperlakukan karyawan dengan adil, dan bertindak sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab. Imbasnya, pada akhirnya akan menguntungkan bagi para pemangku kepentingannya.

Di lain sisi KEPMEN BUMN No. 117/M- MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3, prinsip-prinsip *good corporate governance*, yakni:

- a. Transparansi, terlebih transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan cara maklumat penting perihal perusahaan dipublikasikan;
- b. Kemandirian, yakni suatu keadaan dimana usaha dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa pengaruh atau

tekanan dari luar yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

- c. Akuntabilitas, atau kemampuan organisasi untuk secara jelas mendeskripsikan perannya dan menjalankannya dengan cara yang mempromosikan manajemen perusahaan yang efisien.
- d. Akuntabilitas, terlebih mematuhi persyaratan hukum yang relevan, etika perusahaan, dan praktik terbaik manajemen lainnya.
- e. Kewajaran, terlebih keadilan dan kesetaraan dalam memastikan bahwa hak-hak pemangku kepentingan, yang dihasilkan dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditegakkan.

Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diyakini bisa mempertinggi kinerja bisnis dengan mengembangkan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengukur hasil tata kelola perusahaan lewat pelaporan keuangan dan non-keuangan pada bisnis. Implementasi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan salah satu unsur penting tata kelola perusahaan yang sehat. Prinsip ini menggariskan tanggung jawab perusahaan untuk secara adil dan transparan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua operasi operasional perusahaan pada semua pihak yang

berkepentingan, baik di dalam ataupun di luar organisasi, terlebih di bidang pengelolaan keuangan.

3. Kriteria *Good Corporate Governance*

Hery menuturkan bahwa, ada lima kriteria GCG versi *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yakni, yakni:

a. *The rights of shareholders*

Hak pemegang saham termasuk kemampuan untuk secara tepat waktu menyampaikan maklumat yang relevan perihal perusahaan dan untuk berpartisipasi dalam semua keputusan, dan hak untuk memotong keuntungan. Kontrol atas perusahaan harus dilakukan secara efisien dan publik.

b. *The equitable treatment of shareholders*

All shareholders, particularly minority or international shareholders, have the right to full disclosure of all pertinent company information as part of fair treatment. All shareholders who own shares of the same class must be treated equally. The directors and managers of the Company shall disclose to the other parties all material interests in every transaction of the Company.

c. *The role of stakeholders in corporate governance*

Keterlibatan orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan harus diakui lewat pertimbangan hukum. Kerangka kerja GCG harus bisa mendorong kolaborasi aktif antara bisnis dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lapangan kerja, kemakmuran, dan perusahaan yang stabil secara finansial.

d. *Disclosure and transparency*

Tiap-tiap maklumat yang berkaitan dengan operasi, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, dan problematika lain yang melibatkan pemangku kepentingan dan karyawannya, dipublikasikan secara akurat dan segera. Saat menyajikan laporan keuangan, standar kualitas terbaik harus dipatuhi, dan harus diaudit secara independen.

e. *The responsibilities of the board*

Kerangka kerja GCG harus memastikan akuntabilitas dewan perusahaan pada perusahaan dan pemegang sahamnya, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh dewan perusahaan, dan bimbingan dan pengaturan operasi operasional dan keuangan perusahaan.¹⁵

¹⁵ Thereza Michiko Labesi, "Analisis Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* di PT. Bank Sulut Kantor Pusat Manado", dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 4, Desember 2013, h. 1274-1283.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi kasus ialah jenis studi yang mencoba membahas problematika tertentu dengan menghimpun maklumat dari berbagai sumber. Bagian dari pendekatan kualitatif ialah studi kasus. Menurut Creswell, studi kasus ialah pemeriksaan sistem atau kasus yang terbatas. Sebuah kasus yang menarik untuk diamati sebab unik dan memiliki arti penting bagi orang lain selain peneliti, setidaknya. Menurut Patton, studi kasus melihat kerumitan dan keunikan sebuah contoh sambil berusaha memahami kasus dalam konteksnya sendiri. Peneliti berharap untuk secara akurat mencerminkan kompleksitas problematika dengan memakai pendekatan ini. Situasinya harus unik dan luar biasa.¹⁶

Keuntungan dari studi kasus ialah mereka memberikan penyelidikan menyeluruh perihal topik yang diteliti. Data yang dihimpun bersifat subyektif, maknanya hanya berlaku untuk individu yang bersangkutan dan mungkin tidak senantiasa berlaku untuk problematika yang sama untuk orang lain. Kekurangan ini konsisten dengan bagaimana studi kasus dirancang. Dengan kata lain,

¹⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 49.

implementasi generalisasi pengetahuan relatif sedikit. Studi kasus tidak dimaksudkan untuk menguji teori; sebaliknya, temuan mereka bisa mengarah pada teori yang bisa diverifikasi dengan studi lebih lanjut. Temuan dari studi kasus bisa mengarah pada berbagai teori, konsep, dan aturan.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Ada juga studi ini dijalankan di BAZNAS Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Nyimas Melati No.21A, RT.005/RW.001, Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15117.

3. Kehadiran Peneliti

Peneliti harus hadir di lapangan untuk menghimpun maklumat sedetail mungkin selama kegiatan penelitian, tergantung pada jenis studi yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data yang utama, sehingga keberadaannya menjadi suatu keharusan.¹⁸ Untuk memperdebatkan dan mendalami rebranding dari perspektif etika bisnis Islam, peneliti harus hadir untuk menjumpai dan menggali data yang relevan dengan penekanan utama penelitian. Disini peneliti menjadi alat utama, memastikan bahwa objek atau informan dalam hal

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 36.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), h. 4.

ini pegawai BAZNAS Kota Tangerang mengetahui keberadaan peneliti di tempat penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data ialah hal dari mana data bisa dihimpun. Kedua data primer dan sekunder dipakai untuk menyusun data yang dipakai dalam studi ini.

a. Data Primer

Data primer ialah maklumat yang sudah dihimpun langsung dari sumber data pertama di tempat penelitian atau objek penelitian. Pegawai BAZNAS Kota Tangerang merupakan sumber data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber maklumat sekunder yang berlainan yang kita butuhkan. Data sekunder dalam hal ini mengacu pada literature atau literatur yang mendukung penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapat data yang valid dan bisa di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka peneliti memakai teknik pengumpulan data, yakni:

a. Observasi

Perilaku yang diwujudkan dan hasil yang diinginkan diamati.¹⁹ Alhasil, peneliti melihat dan menjalankan pengamatan langsung di lapangan berlandaskan sampel yang dipakai.

b. Wawancara

Menurut Esterberg, percakapan antara dua orang di mana maklumat dan ide dipertukarkan lewat tanya jawab disebut sebagai wawancara. Wawancara dipakai sebagai strategi pengumpulan data saat seorang peneliti ingin melakukan analisis pendahuluan untuk mengidentifikasi problematika yang perlu diselidiki lebih lanjut dan saat peneliti ingin mempelajari lebih lanjut perihal responden. Metode pengumpulan data ini didasarkan pada laporan diri, atau paling tidak pada pengetahuan dan atau keyakinan individu.²⁰

Esterberg mengemukakan sejumlah macam wawancara, yakni wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.²¹

1) Wawancara terstruktur, Saat peneliti atau pengumpul data yakin akan maklumat yang akan dihimpun, mereka akan

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 131

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 316.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. .317-319.

memakai wawancara terstruktur sebagai pendekatan pengumpulan data. Pengumpul data sudah membuat instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan kemungkinan jawaban untuk melakukan wawancara. Pengumpul data bisa memakai sumber daya seperti tape recorder, foto, brosur, dan sejumlah hal lain yang bisa membantu kelancaran wawancara selain harus membawa instrumen sebagai pedoman wawancara.

- 2) Kategori wawancara mendalam, yang pelaksanaannya lebih adaptif daripada wawancara terstruktur, termasuk wawancara semi terstruktur. Dengan meminta pihak-pihak yang diundang untuk wawancara pendapat dan ide-ide mereka, gaya wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika secara lebih langsung. Peneliti harus memperhatikan dengan seksama selama wawancara dan mencatat apa yang dikatakan informan.
- 3) Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara tidak terbatas di mana peneliti mengabaikan norma untuk melakukan wawancara yang sudah ditetapkan secara hati-hati dan metodelis untuk tujuan pengumpulan data. Panduan wawancara yang dipakai hanyalah daftar pertanyaan wawancara yang akan

ditanyakan. Sebab peneliti tidak mengetahui dengan pasti data apa yang akan dihimpun selama wawancara tidak terstruktur, maka peneliti lebih memperhatikan apa yang dikatakan responden. Peneliti bisa merumuskan rangkaian pertanyaan lanjutan yang lebih tepat sasaran pada tujuan tertentu berlandaskan analisis tanggapan masing-masing responden. Peneliti bisa memakai teknik wawancara "berputar dan kemudian menyelam", di mana topik awal percakapan tidak terkait dengan tujuan penelitian, dan jika topik itu berubah menjadi topik yang relevan di kemudian hari.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi pengumpulan data mencari maklumat perihal sejumlah hal atau variabel berupa gambar, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan jenis referensi lainnya untuk membantu peneliti dalam pekerjaannya.²² Dalam studi ini, peneliti menghimpun benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan-catatan lain dan foto-foto yang ditemukan di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, hipotesis berasal dari data atau didasarkan pada data. Kategori dan konsep dikembangkan oleh para

²² Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), h. 123.

peneliti di lapangan. Sebuah teori yang berkembang di lapangan dan sering diuji sebagai bagian dari proses penelitian bisa didukung oleh data lapangan. Sebab cukup gampang beradaptasi untuk mempertimbangkan maklumat baru dan menjalankan penyesuaian, analisis data bersifat terbuka dan induktif.²³

Untuk menganalisis fenomena secara keseluruhan, penelitian kualitatif ini memakai analisis deskriptif, yakni membandingkan satu set data dengan yang lain dan kemudian mengekstraksi tema umum dari data itu.²⁴

Teknik Analisis data dalam studi ini mengacu pada teknik analisis model Miles dan Huberman yang memuat tiga tahap yaitu

a. Reduksi Data

Reduksi data, memilih komponen kunci, berfokus pada apa yang penting, mencari tema dan pola, dan menghapus maklumat asing ialah semua langkah yang diperlukan dalam proses reduksi data. Data terkompresi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi penghimpunan dan pencarian data baru oleh peneliti. Dengan mengimplementasikan kode ke bagian

²³ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung:Tarsito, 2003), h.29.

²⁴ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 66.

tertentu, perangkat elektronik seperti komputer laptop bisa membantu mengurangi jumlah data. Dalam hal ini, peneliti memberikan klarifikasi atas data yang dihimpunnya dari partisipan penelitian, terlebih perihal tata kelola perusahaan yang efektif.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dengan memakai ringkasan singkat, grafik, dan relasi antar kategori. Dalam hal ini, penulisan naratif paling sering dipakai untuk menyajikan data dari penyelidikan kualitatif Miles dan Huberman. Selain maklumat yang dihimpun dari lokasi penelitian, peneliti dalam hal ini memberikan gambaran yang bagus perihal praktik tata kelola perusahaan.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif ialah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil. Hasil awal bersifat tentatif dan bisa direvisi jika maklumat yang cukup tidak dihimpun untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika peneliti kembali ke lapangan untuk menghimpun lebih banyak data, kesimpulan yang ditawarkan bisa dipercaya jika didukung oleh bukti yang bisa dipercaya dan konsisten. Dalam hal ini peneliti

mengambil keputusan berlandaskan data dari BAZNAS Kota Tangerang, obyek kajian, dan gambaran tata kelola perusahaan yang baik.

d. Indikator Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah sistem penilaian dan pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia. Indikator yang digunakan dalam IZN terdiri dari 11 variabel, yaitu:²⁵

- 1) Manajemen Zakat
- 2) Pengelolaan Zakat
- 3) Pengumpulan Zakat
- 4) Distribusi Zakat
- 5) Akuntabilitas dan Transparansi
- 6) Kepatuhan Zakat
- 7) Pemberdayaan Mustahik
- 8) Peningkatan Kualitas SDM
- 9) Pengembangan Program Zakat
- 10) Komunikasi dan Sosialisasi
- 11) Peningkatan Kualitas Laporan

²⁵ Badan Amil Zakat Nasional. (n.d.). Indeks Zakat Nasional (IZN). Retrieved from <https://baznas.go.id/index.php?page=izn>

Jenis zakat	Nishab	Haul	Kadar	Perhitungan
Zakat Penghasilan	Senilai 85 Gram Emas Atau Setara Uang Rp.79.738.415,-	1 Tahun	2,5%	Penghasilan X 2,5%
Zakat Perdagangan	Senilai 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5%	(Modal Yang Diputar + Laba + Piutang Lancar) – (Hutang Jatuh Tempo + Kerugian) X 2,5%
Zakat Emas dan Perak	Emas: 85 Gram Perak: 595 Gram	1 Tahun	2,5%	(Emas/Perak Yang Dimiliki – Emas/Perak Yang Dipakai) X 2,5%
Zakat Pertanian	Gabah: 653 Kg Beras: 524 Kg	Saat Panen	10% (Jika Diiri Hujan/Mata Air) 5% (Jika Diiri Dengan Irigasi)	10% X Hasil Panen atau 5% X Hasil Panen
Zakat Tabungan	Setara 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5%	(Saldo Akhir – Bunga) X 2,5% Jika Menabung Di Bank Konvensional
Zakat saham	Setara 85 gram emas	1 tahun	2,5%	Khusus saham yang tercantum dalam daftar efek syariah (DES) (capital gain + dividen) x 2,5%

Dimensi	Bobot kontribusi	Indikator	Bobot kontribusi	Variabel	Bobot kontribusi
Makro (X ₁)	0.40	Regulasi (X ₁₁)	0.30	Regulasi	1.00
		Dukungan APBN (X ₁₂)	0.40	Dukungan APBN	1.00
		Database lembaga zakat (X ₁₃)	0.30	Jumlah lembaga zakat resmi (X ₁₃₁)	0.33
				Rasio Muzaki individu (X ₁₃₂)	0.33
				Rasio muzaki badan (X ₁₃₃)	0.33
		Mikro (X ₂)	0.60	Kelembagaan (X ₂₁)	0.40
Pengelolaan (X ₂₁₂)	0.20				
Penyaluran (X ₂₁₃)	0.30				
Pelaporan (X ₂₁₄)	0.20				
Dampak Zakat (X ₂₂)	0.60			Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan CIBEST) (X ₂₂₁)	0.40
				Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi IPM) (X ₂₂₂)	0.40
				Kemandirian (X ₂₂₃)	0.20

7. Pengecekan Keabsahan Data

Verifikasi diperlukan untuk menjamin keakuratan data yang dipakai dalam penelitian, memastikan bahwa data itu bisa dipercaya dan didukung oleh ilmu pengetahuan. Sebuah langkah dalam proses pengumpulan data yang disebut validasi membantu menurunkan kemungkinan kesalahan. Untuk mempertinggi tingkat kepercayaan

pada data yang terkumpul, peneliti akan meneliti kembali data yang sudah terkumpul dengan fokus pada topik penelitian dan melakukan revisi sesuai kebutuhan. Sehubungan dengan hal itu, temuan dalam studi ini bisa divalidasi memakai sejumlah cara. Metode itu memuat:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Partisipasi peneliti memegang peran penting dalam proses pengumpulan data. Partisipasi itu tidak hanya sebatas pada waktu yang singkat, melainkan memerlukan perpanjangan partisipasi yang lebih lama.

Perpanjangan keikutsertaan bermakna peneliti tinggal di lapangan penelitian samapai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi:²⁶

- 1) Membatasi gangguan dari imbas peneliti pada konteks.
- 2) Membatasi kekeliruan (biases) penelitian
- 3) Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Sebab itu, peneliti harus datang ke lokasi penelitian tidak hanya sekali atau dua kali saja, melainkan sebanyak mungkin untuk mendapat data yang dibutuhkan.

²⁶ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif...*", h. 327.

b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan dipakai dalam pemeriksaan data untuk dua tujuan: pertama, untuk mencegah peneliti dari situasi di mana subjek penelitian memberikan maklumat yang tidak benar, menipu, atau mengada-ada, sehingga membuahkan pemahaman yang keliru dan bias dalam penelitian; kedua, untuk memastikan bahwa tiap-tiap data yang diperoleh oleh peneliti ialah akurat, selaras dengan realitas yang diamati, dan bukan kebenaran yang dibuat-buat.²⁷

c. Triangulasi

Teknik triangulasi merupakan cara untuk menghimpun data dengan menggabungkan berbagai teknik dan sumber yang ada. Tujuan dari triangulasi bukan hanya mencari kebenaran perihal fenomena yang diteliti, tetapi juga untuk mempertinggi pemahaman peneliti pada hasil temuan. Menurut Susan Stainback, triangulasi bisa membantu memperkuat kualitas dan validitas data yang dihimpun oleh peneliti.²⁸ Moleong mempartisi teknik pemeriksaan keabsahan data ini pada triangulasi sumber, triangulasi metode/teknik, dan triangulasi teori.

²⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 124.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi....*, h. 327-328.

- 1) Data dari sejumlah sumber dikomparasikan sebagai bagian dari teknik penilaian validitas data triangulasi sumber. Data dari sumber A dikomparasikan dengan data sumber B, dan seterusnya. Dalam dunia studi yang sebenarnya, seorang peneliti harus berurusan dengan banyak sekali data, kebanyakan di antaranya bahkan bertentangan satu sama lain. Sehingga sesudah menjalankan pengkomparasian, peneliti bisa menjamin kebenaran dan kehandalan data dengan memakai teknik triangulasi sumber.
- 2) Memakai kombinasi dari tiga pendekatan atau metode yang berlainan ialah pilihan kedua untuk memverifikasi keakuratan data. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang dihasilkan dari berbagai pendekatan atau metodologi penelitian. Peneliti bisa misalnya mengkontraskan data observasi dengan data wawancara, data wawancara dengan data dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data observasi. Bahkan jika ada konflik data, peneliti bisa menjumpai data yang asli dan bisa dipercaya dalam pendekatan ini.
- 3) Triangulasi teori ialah metode yang melibatkan perbandingan berbagai hipotesis yang berkaitan erat dengan temuan

penelitian. Menurut Moleong, seorang peneliti akan menganggap saat memakai triangulasi teori bahwa jika analisis sudah menggambarkan pola, keterkaitan, dan memberikan pemaparan yang berasal dari analisis, maka penting untuk mencari tema atau pemaparan yang bisa dikomparasikan atau disaring.

d. Model Estimasi Penghitungan

Model penghitungan indeks dalam kajian terbagi menjadi tahapan yang bersifat sistematis sehingga dilakukan secara berurutan. Keseluruhan prosedur estimasi penghitungan indeks tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap Pertama, membuat skoring skala likert dengan rentang 1 – 5, dimana 1 menggambarkan kondisi paling buruk dan 5 kondisi paling baik. Skoring ini dibuat untuk keseluruhan variabel penyusun Indeks. (Detail skoring untuk setiap variabel ada di lampiran)

Tahap Kedua, menghitung indeks setiap variabel. Formula yang dilakukan untuk penghitungan indeks pada setiap variabel adalah

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{(S_{max} - S_{min})}$$

Dimana,

I_i = Indeks pada variabel i

S_i = nilai skor aktual pada pengukuran variabel i

S_{max} = Skor maksimal

S_{min} = Skor minimal

Adapun nilai indeks yang dihasilkan akan berada pada rentang 0.00 –1.00. Ini berarti semakin rendah nilai indeks yang didapatkan semakin buruk kinerja perzakatan nasional, dan semakin besar nilai indeks yang diperoleh berarti semakin baik kondisi perzakatan. Nilai 0.00 berarti indeks zakat nasional yang diperoleh adalah paling rendah

Tahap ketiga kemudian mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk memperoleh indeks pada indikator. Dua indikator yaitu regulasi dan anggaran pemerintah tidak diturunkan ke variabel yang lebih detail sehingga tidak memerlukan penghitungan khusus pada tahap ini. Sedangkan tiga indikator lain, yang diturunkan ke dalam beberapa variabel, memiliki penghitungan khusus yaitu :

yaitu “nol”. Sedangkan nilai 1.00 berarti nilai indeks paling tinggi, yaitu “sempurna”

$$X_{13} = 0.33X_{131} + 0.33X_{132} + 0.33X_{133}$$

dimana,

X_{13} : Indeks Indikator Database Lembaga Zakat

X_{131} : Indeks Variabel Jumlah Lembaga Zakat Resmi

X_{132} : Indeks Variabel Rasio Muzaki Individu Terhadap Jumlah
Rumah Tangga

X_{133} : Indeks Variabel Rasio Muzaki Badan Terhadap Jumlah
Badan Usaha

$$X_{21} = 0.30X_{211} + 0.20X_{212} + 0.30X_{213} + 0.20X_{214}$$

dimana,

X_{21} : Indeks Indikator Kelembagaan

X_{211} : Indeks Variabel Penghimpunan

X_{212} : Indeks Variabel Pengelolaan

X_{213} : Indeks Variabel Penyaluran

X_{214} : Indeks Variabel Pelaporan

$$X_{22} = 0.40X_{221} + 0.40X_{222} + 0.20X_{223}$$

dimana,

X_{22} : Indeks Indikator Dampak Zakat

X_{221} : Indeks Variabel Kesejahteraan CIBEST (material dan spiritual)

X_{222} : Indeks Variabel Pendidikan dan Kesehatan (Modifikasi

IPM) X_{223} : Indeks Variabel Kemandirian

Tahap keempat lalu mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing-masing, untuk memperoleh indeks pada dimensi makro dan dimensi mikro,

$$X_1 = 0.30X_{11} + 0.40X_{12} + 0.30X_{13}$$

dimana,

X_1 : Indeks Dimensi Makro

X_{11} : Indeks Indikator Regulasi

X_{12} : Indeks Indikator Dukungan APBN

X_{13} : Indeks Indikator Database lembaga zakat

$$X_2 = 0.40X_{21} + 0.60X_{22}$$

dimana,

X_2 : Indeks Dimensi Mikro

X_{21} : Indeks Indikator Kelembagaan

X_{22} : Indeks Indikator Dampak zakat

Tahap terakhir adalah mengalikan indeks yang diperoleh pada setiap dimensi dengan bobot masing-masing untuk memperoleh

Indeks Zakat Nasional, yaitu :

$$IZN = 0.40X_1 + 0.60X_2$$

dimana,

IZN : Indeks Zakat Nasional

X_1 : Dimensi makro

X_2 : Dimensi mikro

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai dalam studi ini ialah sebagai berikut :

- a. **BAB I : PENDAHULUAN.** Menguraikan perihal pendahuluan yang memuat Latar Belakang Penelitian, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan
- b. **BAB II : LANDASAN TEORI.** Menguraikan perihal landasan teori, dan Rencana Strategis
- c. **BAB III : TATAKELOLA BAZNAS KOTA TANGERANG.** Menguraikan perihal ruang lingkup penelitian, kekuatan dan kelemahan ruang lingkup penelitian.
- d. **BAB IV : PEMBAHASAN.** Menguraikan perihal Gambaran Umum hasil temuan.
- e. **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.** Menguraikan simpulan, keterbatasan penelitian dan saran.